

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Sutarno

Pendahuluan

Negara multikultural merupakan sebutan yang sangat cocok untuk Indonesia. Mengapa ? Karena Indonesia memiliki *keragaman* agama dan kepercayaan, suku, jumlah dan persebaran pulau, bahasa dan sejumlah keragaman lain. Keragaman itu merupakan *potensi dan keunikan* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi keragaman dan keunikan tersebut selama ini belum mendapatkan kesempatan berkembang dan mengelola diri berdasar *kearifan budaya dan kemauan hidup berdampingan secara damai*. Paradigma di bidang pendidikan kita yang sangat sentralistik telah mengabaikan keragaman yang menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan, yang berlatarbelakang etnis dan budaya silih berganti terjadi di negara ini. Negara ini diambang disintegrasi bangsa bila tidak segera mendapat penanganan yang serius.

Secara khusus, setelah mempelajari secara mendalam Subunit ini Anda diharapkan

1. Mampu menjelaskan implikasi makna Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural.
2. Mampu menjelaskan implikasi pemahaman sejarah Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural. Setelah mempelajari unit ini Anda diharapkan dapat:
3. menjelaskan implikasi problematika multikultural di Indonesia terhadap pengembangan Pendidikan multikultural

Agar dapat memahami Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia secara mendalam, Anda harus membaca secara cermat, menganalisis dan mendiskusikan setiap paparan yang disajikan. Jangan lupa, untuk mengecek tingkat pemahaman atau pengalaman belajar yang telah dimiliki, Anda harus mengerjakan latihan dan tes formatif yang disajikan pada setiap penggalan kegiatan belajar dalam Unit ini.

Pahami dan amati keunikan budaya di tanah air dan temukan kearifan budayanya! Marilah kita menjadi warga negara yang cerdas budaya.

Subunit 1

Implikasi Makna Pendidikan Multikultural, Sejarah dan Karakteristik Problematika Multikultural terhadap Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Untuk mengembangkan Pendidikan Multikultural di Indonesia, kita perlu mengetahui lebih dahulu makna atau pengertian dari Pendidikan Multikultural, sejarah yang melatarbelakangi kemunculan Pendidikan Multikultural dan karakteristik problematika multikultural Indonesia. Karena dari pengertian yang kita gunakan dan mengetahui sejarah Pendidikan Multikultural kita dapat mengetahui petunjuk ke arah mana pengembangan Pendidikan Multikultural dilakukan. Dengan mengetahui karakteristik problematika multikultural di Indonesia kita dapat memberikan solusi yang tepat dan dapat dijadikan fokus pengembangan Pendidikan Multikultural.

Makna Pendidikan Multikultural dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Multikultural

Dari uraian sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pemaknaan Pendidikan Multikultural berbeda-beda. Ada yang menekankan pada karakteristik kelompok yang berbeda, sedangkan yang lain menekankan masalah sosial (khususnya tentang penindasan), kekuasaan politik, dan pengalokasian sumber ekonomi. Ada yang memfokuskan pada keragaman etnis yang berbeda, sedangkan yang lain berfokus pada kelompok dominan di masyarakat. Makna yang lain membatasi pada karakteristik sekolah lokal, dan yang lain memberi petunjuk tentang reformasi semua sekolah tanpa memandang karakteristiknya.

Pemaknaan Pendidikan Multikultural yang dianut oleh suatu sekolah dapat berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural. Berikut ini akan diuraikan makna Pendidikan Multikultural yang dapat berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural.

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk

kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Sebagai sebuah ide, maka Pendidikan Multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya (Sizemore, 1981). Dengan mempelajari buku *Habis Gelap terbitlah Terang* (hasil karya) yang berasal dari surat-surat Kartini pada temannya Abendanon, kita mengetahui *ide* emansipasi wanita yang berasal dari generasi abad 18. Dengan membaca karya *Wulangreh* kita dapat mengetahui pemikiran pihak keraton dalam memahami dan menafsirkan serta dalam menjalankan ajaran agama Islam di kalangan keraton. Dengan mengkaji *Serat Wirid Hidayat Jati* kita mengetahui pemahaman para wali tentang ajaran esoterisme Islam beberapa abad lalu. Dengan memahami *keris*, kita mengetahui pola budaya dan keyakinan suku Jawa tentang kelengkapan hidup seorang lelaki Jawa yang utuh. Dalam budaya Jawa tradisional, keris tidak semata-mata dianggap sebagai senjata tikam yang memiliki keindahan dan keunikan bentuk, akan tetapi juga sebagai kelengkapan budaya spiritual. Uraian lebih lanjut dapat Anda baca pada subunit selanjutnya.

Implikasinya terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia (Parekh, 1986: 26-27). Pendidikan memang mengajarkan nilai-nilai budayanya sendiri namun selain itu juga perspektif dan budaya orang lain di wilayah lain di seluruh dunia. Hal ini dapat membuat siswa “melek budaya” (cultural literacy) yang mampu melihat berbagai sudut pandang budaya yang pernah hidup di berbagai belahan dunia. Dahulu orang Persia (sekarang Iran) menganggap bahwa status sosial orang yang meninggal dapat diukur dari jumlah orang yang menangi kepergian orang yang meninggal. Bandingkan dengan kondisi sekarang, kita bisa juga mengukur penghormatan masyarakat terhadap seseorang yang meninggal dari jumlah orang yang datang melayat. Ada unsur persamaan, bahwa seseorang yang terpendang, dihormati dan disukai akan diukur dari kuantitas dan kualitas dari orang yang datang ikut berbela sungkawa. Kuantitas diukur dari jumlah orang yang mengantarkan jenazah, dan kualitas diukur dari tingkat kesedihan orang-orang yang ditinggalkan dan merasa ditinggalkan.

Perlu adanya pelembagaan filsafat pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang dilandasi prinsip persamaan, saling menghormati, penerimaan dan pemahaman, dan komitmen moral demi keadilan sosial (Baptiste, 1979). Pendidikan Multikultural selalu dilandasi prinsip persamaan dan keadilan sosial. Implikasinya, kurikulum perlu direformasi sehingga benar-benar mencerminkan penghormatan atas pluralitas budaya.

2. Pendidikan Multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan.

Pendidikan Multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen itu mencakup:

- a. *nilai-nilai yang mendasari*, artinya nilai-nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat yang mendasarinya.
- b. *aturan prosedural*, artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragam itu.
- c. *kurikulum*. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, proses, dan evaluasi. Artinya dibutuhkan penyusunan kurikulum baru yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- d. *bahan ajar*, artinya materi multikultural itu harus tercermin dalam materi pelajaran, pada semua bidang studi. Multikultural bukan hanya diajarkan satu bidang studi melainkan lebih merupakan materi pelajaran yang bisa disisipkan pada semua bidang studi.
- e. *struktur organisasi*, artinya struktur organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi riil yang pluralistik. Budaya di lingkungan unit pendidikan yang pluralistik adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa
- f. *pola kebijakan* artinya pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya.

Nilai-nilai yang mendasari, aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi, dan pola kebijakani pendidikan perlu dirombak agar mencerminkan budaya Indonesia yang pluralistik. Hal ini tentunya merupakan pekerjaan yang besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam pula. Kurikulum kita masih belum mencerminkan semangat ini dan masih membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu yang panjang. Beberapa konsep tentang muatan lokal nampaknya masih belum memenuhi harapan dari konsep ini.

Pendidikan Multikultural juga dipandang sebagai suatu pendekatan belajar dan mengajar yang didasarkan pada nilai-nilai *demokratis* yang mengedepankan pluralisme budaya; dalam bentuknya yang paling komprehensif. Nilai-nilai demokratis sejajar dengan nilai pluralisme budaya karena atas dasar *kesetaraan* itu nilai-nilai budaya yang pluralistik itu bisa tumbuh berkembang secara wajar dan tanpa diskriminasi.

Bennett (1990) menyatakan bahwa Pendidikan Multikultural berkaitan dengan komitmen untuk menggapai kualitas pendidikan, mengembangkan kurikulum yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi praktek penindasan. Perlu ada komitmen bersama di antara pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada seluruh warga yang berasal dari berbagai unsur pluralitas.

Agar kualitas pendidikan itu bisa ditingkatkan perlu dikembangkan kurikulum (baru) yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi segala praktek penindasan.

3. Pendidikan Multikultural sebagai proses.

Pendidikan Multikultural bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Pendidikan Multikultural merupakan suatu proses yang terus menerus yang membutuhkan investasi waktu jangka panjang di samping aksi yang terencana dan dimonitor secara hati-hati (Banks & Banks, 1993). Selain di lembaga pendidikan, siswa dapat pula mengalami proses pembelajaran yang diperoleh lewat perilaku yang terencana dan sistematis. Siswa dapat memperoleh pembelajaran lewat penyadaran dan penghormatan terhadap orang cacat dengan memberi jalur khusus di stasiun, terminal ataupun bandara. Di kota besar seperti Jakarta, pemberian jalur khusus untuk orang cacat (misalnya stasiun Gambir dan Bandara Sukarno Hatta) dapat membelajarkan siswa. Bandingkan pemahaman budaya dan proses penyadaran yang berbeda dengan negara lain. Pernah terjadi di Amerika Serikat, seseorang yang berasal dari Indonesia yang membukakan jalan pada orang cacat yang naik kursi roda. Apa yang terjadi ? Orang itu justru marah dan tersinggung. Dia bertanya dari mana Anda berasal dan dijawab “Indonesia”. Dia menjawab “Pantas. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda.” Sungguh ironis. Maksudnya ingin membantu dan menghormati orang yang “memiliki kekurangan”. Namun dari sikap orang Indonesia itu tersirat “memandang rendah orang yang cacat”.

ASCD Komisi Pendidikan Multikultural (Di dalam Grant, 1977b: 3) menegaskan bahwa Pendidikan Multikultural berhubungan dengan konsep humanistik yang didasarkan pada kekuatan dari keragaman, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan gaya hidup alternatif bagi semua orang, yang diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas dan meliputi semua upaya untuk memenuhi seluruh budaya bagi siswa; yang memandang masyarakat multikultural pluralistik sebagai kekuatan positif dan menjadikan perbedaan sebagai wahana untuk lebih memahami masyarakat global. Dari uraian panjang di atas ada beberapa ide utama yang bisa kita ambil:

- a. Pendidikan Multikultural berhubungan dengan konsep humanistik. Konsep yang didasarkan pada kekuatan dari keragaman, HAM, keadilan sosial dan gaya hidup.
- b. Pendidikan Multikultural mengarah pada pencapaian pendidikan yang berkualitas
- c. Melibatkan segala upaya untuk memenuhi seluruh budaya siswa
- d. Memandang masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif
- e. Perbedaan adalah wahana memahami masyarakat global.

Ada kaitan erat antara Pendidikan Multikultural dengan konsep humanisme. Keduanya memandang manusia sebagai manusia yang memiliki keunikan yang harus dihormati keberadaannya. Menghormati keragaman dan gaya hidup berarti juga

menghormati hak asasi manusia yang dilandasi keadilan sosial. Semua hal di atas ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Di samping itu pendidikan harus mencakup seluruh budaya siswa dan memandang bahwa masyarakat yang pluralistik itu sebagai kekuatan positif dan perlu disikapi secara positif pula. Pemahaman perbedaan dan keragaman ini sangat diperlukan untuk lebih memahami fenomena keragaman masyarakat global. Apalagi dengan semakin pesatnya teknologi, komunikasi dan informasi saat ini, maka kejadian apa pun di seluruh pelosok dunia akan dapat diketahui oleh siapa pun, di manapun dan kapan pun juga. Inilah yang sering disebut sebagai “*global village*”.

Lebih lanjut Grant menekankan bahwa Pendidikan Multikultural terkait dengan kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi (Grant, 1977). Kebijakan pembatasan berupa persyaratan tertulis yang mencegah masuknya kelompok multikultural dapat dipandang sebagai anti terhadap Pendidikan Multikultural. Misalnya hanya untuk laki-laki saja, perempuan saja, persyaratan tinggi tertentu, asal daerah tertentu dan sebagainya.

Nieto (1992) memandang Pendidikan Multikultural terkait dengan :

1. reformasi sekolah dan pendidikan dasar yang komprehensif untuk semua siswa,
2. penentangan terhadap semua bentuk diskriminasi,
3. menyerapan pelajaran dan hubungan interpersonal di kelas, dan
4. penonjolan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan sosial (Nieto, 1992).

Pendidikan Multikultural dilihat oleh Nieto sebagai reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif, bukan sekedar penambahan materi dan pemahaman sudut pandang dari budaya yang lain. Pendidikan Multikultural dapat berhasil bila terwujud dalam hubungan interpersonal yang menentang semua bentuk diskriminasi. Pendidikan multikultural terwujud dalam bentuk menonjolan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ada suatu proses yang dijalani dalam hubungan interpersonal bukan sekedar segi kognitif semata.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Bennet (1995) menyatakan bahwa pendidikan multikultural didasarkan pada nilai dan keyakinan demokratis, dan upaya mengembangkan pluralisme budaya dalam masyarakat yang secara kultural berbeda. Menurut Bennet definisi Pendidikan Multikultural mencakup dimensi :

- (1) gerakan persamaan (yang dalam konsep Banks disebut gerakan reformasi pendidikan),
- (2) pendekatan multikultural,
- (3) proses menjadi multikultural, dan
- (4) komitmen memerangi prasangka dan diskriminasi.

Selaras dengan pemikiran pakar Pendidikan Multikultural lainnya, Bennet melihat Pendidikan Multikultural itu sebagai gerakan persamaan di dalam pendidikan. Ketimpangan yang ada selama ini ada dalam pendidikan harus dikurangi dan dihilangkan sehingga seluruh etnis dan budaya yang ada bisa mencapai prestasi secara optimal. Pendidikan Multikultural juga merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan sudut pandang multikultural. Kita perlu mengubah sudut pandang dari satu sudut pandang kelompok dominan menjadi sudut pandang yang multikultural. *Semua itu belum tercapai dan masih dalam proses untuk menjadi multikultural.* Kondisi multikultural belum tercapai dan hal itu membutuhkan komitmen bersama kita untuk memerangi prasangka dan diskriminasi.

Oleh karena itu pengembangan dari pendidikan multikultural pun berbeda mulai dari memberi informasi tentang berbagai kelompok di dalam buku teks, memerangi rasisme, hingga restrukturisasi kegiatan sekolah secara keseluruhan serta mereformasi masyarakat untuk membuat sekolah lebih adil, menerima dan seimbang secara kultural. Hal ini berarti perlu perubahan program, kebijakan dan praktek sekolah.

Dari definisi ini pendukung kelompok ini berpendapat bahwa *program* Pendidikan Multikultural seharusnya mencakup identitas etnis, pluralisme budaya, distribusi sumber dan kesempatan, dan masalah sosiopolitis yang berasal dari sejarah penindasan yang panjang. Pendidikan Multikultural merupakan seperangkat *materi khusus* yang digunakan untuk pembelajaran. Pendidikan Multikultural berarti *mempelajari tentang budaya yang berbeda, atau belajar untuk menjadi bikultural.* Dalam subunit lain dari buku ini, disajikan materi khusus tentang budaya Jawa, Cina dan Bali. Seorang siswa akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Jawa, Cina, atau Bali dan mengakui bahwa di sekitar dirinya terdapat pluralisme budaya yang harus dihargai dan dihormati sehingga tumbuh sikap toleransi terhadap pandangan hidup, keyakinan serta perilaku orang lain. Dia sebagai orang Jawa perlu mengetahui budayanya sendiri di samping budaya orang lain. Dia perlu memahami bahwa dalam budaya Jawa ada *tata krama* dalam *berbahasa* (krama inggil) yang harus digunakan agar dia tidak dikucilkan oleh masyarakat yang mengagungkan budaya itu. Sebagai orang Jawa dia seringkali bertemu dengan orang Cina yang memiliki kepercayaan tentang *Feng Shui* yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan dan bahkan seluruh kehidupannya. Dia juga harus merasa memiliki (sense of belonging) Bali sehingga perlulah bagi dirinya untuk mengenal berbagai hal tentang Bali sebagai salah satu tempat wisata paling dikenal di seluruh dunia. Alangkah piciknya siswa kita sebagai sesama bangsa Indonesia bila dia tidak mengenal Bali sementara orang asing sudah lebih banyak mengenal Bali.

Sejarah Pendidikan Multikultural dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Multikultural

Untuk pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia, kita juga perlu memahami sejarah singkat Pendidikan Multikultural sebagai dasar pijak kita dalam menentukan arah pengembangan.

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang menganut konsep demokratis karena sejak kelahiran dan sejarahnya memang bersorak multikultural, hal ini bukan barang baru lagi. Mereka telah berupaya melenyapkan diskriminasi rasial untuk tujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan Multikultural sebagai *konsep senantiasa berkembang dan beragam*. Pentinglah untuk meninjau kembali dasar-dasar historis yang dapat dijadikan sebagai akar darimana Pendidikan Multikultural itu dikembangkan di Indonesia. Dengan mempelajari sejarah akan dapat kita ketahui bentuk awal Pendidikan Multikultural dan perubahannya serta kondisi sosial yang memunculkannya.

Sebagaimana telah diungkapkan pada Unit 3, akar sejarah Pendidikan Multikultural bermula pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis memang selalu terabaikan dan tertindas. Pendidikan Multikultural timbul dari munculnya gerakan hak-hak sipil di Amerika tahun 1960-an yang mulai menyadari dan menuntut hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan utamanya menghilangkan diskriminasi dalam akomodasi umum, perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Gerakan hak-hak sipil ini berimplikasi terhadap:

- a. berdirinya lembaga pendidikan bagi kelompok etnis. Awalnya hanya pada sekolah untuk orang Amerika keturunan Afrika dan kemudian kelompok lain.
- b. reformasi kurikulum sehingga sekolah dan lembaga pendidikan yang lain merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya dan perspektif mereka.
- c. kenaikan upah bagi guru dan administrator sekolah kulit hitam dan berwarna lain.
- d. adanya kontrol masyarakat terhadap sekolah.
- e. revisi buku teks agar merefleksikan keberagaman orang di AS.

Respon awal para pendidik terhadap gerakan ini nampak tergesa-gesa. Program dan pelajaran dikembangkan tanpa pemikiran dan perencanaan yang hati-hati dan sekedar memberi kesan edukatif atau melembaga dalam sistem pendidikan. *Karakteristik dominan dari reformasi sekolah* yang berkaitan dengan keberagaman etnis dan budaya selama *tahun 1960-an dan awal 1970-an* adalah *adanya program Hari Libur dan hari khusus lain, perayaan etnis, dan pelajaran yang berfokus pada satu kelompok etnis*. Bidang studi etnis yang dikembangkan dan diimplementasikan selama periode ini biasanya *bersifat pilihan* dan diambil terutama oleh siswa yang menjadi anggota kelompok itu.

Keberhasilan yang nyata dari gerakan hak sipil, ditambah pertumbuhan yang cepat, dan atmosfer nasional yang bebas telah merangsang kelompok korban yang lain untuk mengambil tindakan dalam menghilangkan diskriminasi terhadap mereka dan menuntut agar sistem pendidikan itu dikaitkan dengan kebutuhan, aspirasi, budaya dan sejarah mereka. Pada akhir abad 20 gerakan hak perempuan muncul sebagai satu dari gerakan reformasi sosial paling signifikan. Pemimpin gerakan ini seperti Betty Friedan dan Gloria Steinem menuntut *lembaga politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan melakukan tindakan untuk menghilangkan diskriminasi gender* serta

memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasi bakatnya dan mewujudkan ambisinya. Sekalipun sebagian besar guru di sekolah dasar adalah perempuan, sebagian besar administrator masih dipegang oleh kaum pria. Tujuan utama dari gerakan hak perempuan adalah:

- a. upah yang sama atas kerja yang sama,
- b. penghapusan aturan hukum yang mendiskriminasikan wanita dan pria,
- c. penghapusan terhadap hal-hal yang membuatnya menjadi warga negara kelas dua,
- d. menuntut adanya partisipasi yang lebih besar dari kaum pria untuk terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak.

Ternyata gerakan hak perempuan ini sekarang berpengaruh kuat di Indonesia akhir-akhir ini. Muncul berbagai seminar, kajian ilmiah, penelitian, dan organisasi perempuan yang menuntut hak yang lebih baik bagi kaum perempuan. Bahkan secara politik, kelompok ini telah berhasil mengakomodasikan gerakan dan ide mereka dalam bentuk Amandemen UUD yang menuntut agar anggota dewan (DPR) harus memasukkan kaum perempuan minimal 30 % sebagai anggota dewan.

Ketika feminis melihat lembaga pendidikan, mereka mencatat masalah-masalah yang sama dengan yang diidentifikasi oleh kelompok etnis dari kulit berwarna. Ada kesamaan masalah antara kelompok feminis dan kelompok etnis kulit berwarna. Buku teks dan kurikulum didominasi oleh pria dan tidak begitu nampak unsur perempuan di dalamnya. Feminis menunjukkan bahwa buku teks sejarah didominasi oleh sejarah politik dan militer yang merupakan bidang-bidang yang memang partisipan utamanya adalah pria. Sebagian besar mengabaikan sejarah sosial dan keluarga, sejarah buruh dan orang-orang biasa. Feminis mendesak untuk revisi buku teks dengan memasukkan lebih banyak *sejarah tentang peranan penting dari perempuan dalam perkembangan negara dan dunia*.

Kelompok korban yang lain memerinci keluhan mereka dan menuntut lembaga-lembaga itu direformasi sehingga diskriminasi itu berkurang dan memperoleh hak-hak asasi manusia yang lebih baik. Orang dengan ketidakmampuan/cacat, warga negara senior, dan hak-hak kaum gay merupakan salah satu di antara kelompok yang terorganisir secara politis selama periode ini dan membuat terobosan signifikan dalam mengubah lembaga dan aturan hukum. Pendukung bagi warga negara cacat mencapai kemenangan legal yang signifikan selama tahun 1970-an. *The Education for All Handicapped Children Act 1975 (pasal/hal P.L. 94 – 142)* yang mengharuskan siswa yang tidak mampu/cacat dididik dalam lingkungan terbatas dan dalam lembaga tertentu merupakan kemenangan legal paling signifikan dari gerakan hak-hak siswa yang tidak mampu/cacat dalam bidang pendidikan.

Karakteristik Problematika Multikultural Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Pendidikan Multikultural

Subunit ini akan menguraikan pandangan tentang bentuk pendidikan multikultural apa yang sesuai untuk situasi dan kondisi Indonesia.

Berbagai kekerasan antar kelompok yang bergolak secara sporadis seputar persoalan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) banyak terjadi dan terus bermunculan di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke terjadi berbagai peristiwa berdarah. Di Aceh terjadi pergolakan yang bernuansa separatis dan ingin memerdekakan diri melalui Gerakan Aceh Merdeka. Untunglah masalah ini bisa diselesaikan dengan damai, namun masalah ini belum tuntas. Penyelesaian damai ini menyisakan masalah yang masing harus dituntaskan dengan arif. Di Sampit terjadi peristiwa yang sangat menggegerkan dunia ketika banyak mayat bergelimpangan tanpa kepala dan diliput ke seluruh dunia. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal berbudaya ramah, ternyata mulai dikenal sebagai bangsa yang primitif dengan kebuasan kulturalnya. Kenapa disebut 'kebuasan kultural' ? Karena di dalam kultur itu ada keyakinan bahwa musuh itu harus dipenggal kepalanya. Perang bernuansa suku terjadi antara Suku Dayak dan Suku Madura. Terjadinya peledakan bom di Bali ("Bom Bali I" dan "Bom Bali II") dan peledakan "Bom Kuningan" di Jakarta sangat meruntuhkan kepercayaan dunia dalam berinvestasi di Indonesia. Dengan tertembaknya Dr. Azahari di Batu, Malang dan tertangkapnya sebagian anggota kelompok memang kondisi keamanan sedikit relatif kondusif, namun masih menyisakan bahaya laten dari anggota kelompok yang lain. Di Poso terjadi kekerasan antara kelompok Islam dan Kristen yang saling bermusuhan. Hal yang sama terjadi juga di Ambon. Peristiwa di Poso dan Ambon lebih bernuansa keagamaan. Sementara di Papua terjadi gerakan ingin memerdekakan diri dalam bentuk OPM dan peperangan antar suku. Semua peristiwa di atas hanyalah beberapa peristiwa yang terbuka dan menimbulkan korban nyata, belum lagi peristiwa lain yang masih mengancam negeri ini.

Faktor-faktor yang melatar belakangi semua pertikaian di tanah air itu disebabkan antara lain:

1. kuatnya prasangka, etnosentrisme, stereotip dan diskriminatif antara kelompok.
2. merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan serta saling pengertian.
3. aktivitas politis identitas kelompok/daerah di dalam era reformasi.
4. tekanan sosial ekonomi

Dari semua faktor di atas, semuanya bertitik tolak dari kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Semua kondisi itu memang indah dan menjadi kekayaan budaya, tetapi kondisi itu rentan terhadap adanya perpecahan. Realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "*integrating force*" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya.

Lebih dari tiga dasawarsa, kebijakan yang sentralistis dalam bentuk "mementingkan kepentingan nasional" yang terimplementasi berupa pengamanan

yang ketat terhadap isu “kedaerahan” telah mengabaikan kemampuan masyarakat mengatasi masalah tersebut secara terbuka, rasional, beradab dan damai. Sementara itu pemberian kewenangan yang terlalu besar pada daerah tanpa kesadaran kebangsaan dan kesadaran multikultural sering menimbulkan berbagai gejolak di tanah air ini. Mengapa semua ini bisa terjadi dan bagaimana upaya kita mengatasinya?

Ketika banyak terjadi peristiwa yang silih berganti dan beragam bentuk itu, timbul pemikiran yang nampak mewarnai pemikiran di sebagian besar bangsa Indonesia. Ada tiga kelompok pemikiran yang biasa berkembang di Indonesia dalam menyikapi konflik yang sering muncul.

Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari ikatan primordial seperti suku, ras, agama dan antar golongan merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan. Contohnya, peristiwa Sampit, kerusuhan anti Cina, peristiwa Poso dan Ambon.

Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat saja, yang digunakan individu atau kelompok tertentu untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya. Sebaliknya dengan meneriakkan “garis keras Islam” digunakan untuk membatasi bidang gerak supaya tidak mengena pada kelompoknya. Pemberian ‘label’ ini digunakan bila kata Islam itu mulai dipandang negatif ketika pelaku pemboman itu datang dari kelompok Islam tertentu. Hukuman mati yang dijatuhkan pada kelompok Tibo Cs beberapa waktu yang lalu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan demo dan kerusuhan di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau berpikir logis, berjiwa nasionalis dan tidak mengikuti kehendak negatif kelompok elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi.

Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Di antara ketiganya, kelompok ketiga ini yang berpikir positif tentang kondisi multikultural Indonesia.

Sekolah dan lingkungan belajar harus memberi pengalaman belajar untuk semua anak darimana dia berasal dan harus menggambarkan budaya masyarakat di mana mereka berada. Pendidikan Multikultural harus menjadi tujuan pengembangan warga negara dan warga masyarakat yang lebih demokratis lewat penyediaan pengetahuan

yang lebih akurat, komprehensif dan lewat peningkatan prestasi akademis dan pemikiran kritis yang diterapkan pada masalah sosial.

Subunit 2

Prinsip Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pada Subunit 2 ini akan diuraikan tentang prinsip pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Pada bagian ini akan dijabarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Pendidikan Multikultural di Indonesia.

Bentuk Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Bentuk pengembangan Pendidikan Multikultural di setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia dapat berbentuk :

1. *Penambahan materi multikultural* yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Semua bidang studi bisa bermuatan multikultural. Namun disadari bahwa ada mata pelajaran yang lebih mungkin dibandingkan yang lain untuk mengajarkan Pendidikan Multikultural. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial lebih mungkin mengajarkan multikultural dibandingkan dengan matematika.
2. *Berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri.* Sekarang sudah ada perintisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan Multikultural sebagai ide, gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Tiga hal di atas tidak akan dapat dicapai bila hanya dicantumkan sebagai satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam satu bidang studi.
3. *Berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan.* Pendidikan Multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Konsekuensinya, Pendidikan Multikultural tidak dapat diidentifikasi sebagai praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan saja. Lebih dari itu, pendidik yang mempraktekkan makna Pendidikan Multikultural akan menggambarkan berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan *persamaan pendidikan, perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu.*
4. Pada wilayah kerja sekolah, Pendidikan Multikultural mungkin berarti (1) suatu *kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis*; (2) suatu *program* yang mencakup pengalaman multikultural, dan (3) suatu *total school reform*, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi

kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Ini lebih luas dan lebih komprehensif dan biasa disebut reformasi kurikulum.

5. *Gerakan persamaan*. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Di Kabupaten Nabire, Papua ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebhinekaan yang bernama *Kampung Bhineka Tunggal Ika*. Penduduk Kampung Bhineka Tunggal Ika ini terdiri dari orang Papua, Timor, Jawa dan Bugis. Mereka yang tinggal di sana mendapat tanah seluas 2 hektar tiap kepala keluarga untuk ditanami dengan tanaman coklat dan tanaman produktif lainnya. Mereka hanya boleh menggarap tanah itu dan tidak boleh menjualnya. Mereka harus menunjukkan kemampuan bertani yang baik lebih dahulu sebelum diterima menjadi warga Kampung Bhineka Tunggal Ika. Kini kampung itu telah menjadi besar dan di Kabupaten Nabire, Papua ini direncanakan akan membentuk Kampung Nusantara yang terdiri dari generasi muda berusia 27 tahun hingga 35 tahun. Ada kesadaran akan keberagaman budaya yang menghilangkan sekat-sekat agama dan adat. Mereka saling mengunjungi saat orang dari agama lain merayakan hari besarnya. Mereka harus menghormati hukum nasional dan hukum adat setempat. Misalnya, buah pohon tetangga yang masuk ke pekarangan tetangga menjadi milik tetangga itu. Orang yang melanggar akan ditindak tegas. Bahkan menurut adat di sana, orang yang mengambil milik tetangganya boleh dibunuh. Di Manado, Sulawesi Utara, ada juga gerakan semacam ini. Mereka akan dengan suka rela membantu tetangga dan masyarakat yang berlainan agama bila tetangganya itu membutuhkan. Misalnya membangun masjid atau gereja. Sebagai sebuah gerakan, maka Pendidikan Multikultural perlu dimasyarakatkan dalam karya nyata di samping lokakarya. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya program pendidikan yang ditayangkan berbagai siaran televisi, radio atau pun internet. Perlu dihimbau, kalau tidak mungkin diharuskan, untuk menayangkan program yang bernuansa budaya dalam siaran mereka. Sekarang ini sudah ada beberapa stasiun yang mencoba menayangkan program semacam itu dan hasilnya bagus. Diharapkan hal ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mengurangi acara-acara yang justru menimbulkan hasutan dan pertikaian.
6. *Proses*. Sebagai proses, maka tujuan Pendidikan Multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan. Perlu ada pembudayaan di segenap sektor kehidupan.

Tantangan Pendidikan Multikultural, baik dalam teori maupun dalam praktek, adalah bagaimana meningkatkan keadilan bagi kelompok korban tertentu tanpa membatasi kelompok dan kesempatan yang lain. Sekalipun berbagai kelompok dijadikan sasaran untuk penguatan dan keadilan dalam Pendidikan Multikultural sesuai kebutuhan dan tujuan, kadang mereka menerima kebutuhannya sebagai beragam, bertentangan, dan tidak konsisten sebagaimana halnya pernah terjadi pada beberapa kelompok feminis dan etnis di masa lampau. Sebab utama dari ketegangan di antara berbagai kelompok korban mungkin dilembagakan oleh praktek di dalam masyarakat yang meningkat ketegangan, konflik dan keberagaman di antara mereka. Dalam hal ini, mungkin tujuan penting dari Pendidikan Multikultural adalah

membantu anggota kelompok yang menjadi korban agar lebih bersatu dan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari koalisi itu. Koalisi ini dapat menjadi wahana untuk perubahan sosial dan reformasi. Upaya Jesse Jackson untuk membentuk apa yang disebut *Rainbow Coalition* pada level nasional pada tahun 1980-an merupakan salah satu dari tujuan utama rumusan koalisi politik yang efektif yang terdiri dari orang-orang dari kelompok gender, ras, budaya, dan kelompok kelas sosial yang berbeda.

Saat ini, ada banyak model dan kerangka kerja Pendidikan Multikultural. Ada variasi dalam pengembangan Pendidikan Multikultural, mulai dari penambahan sumber yang beragam dalam kurikulum hingga pada revisi kurikulum kecil atau bahkan sudah pada pendekatan yang berusaha melakukan perubahan mendasar terhadap diri, sekolah, dan masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh ahli teori dan sarjana yang punya komitmen tinggi terhadap Pendidikan Multikultural. *Bagaimana Indonesia ? Sebagai negara yang baru mengenal Pendidikan Multikultural maka wajarlah bila Indonesia masih pada taraf pertama dengan penambahan bahan ajar dalam kurikulum. Namun dengan memahami akar gerakan Pendidikan Multikultural di atas, secara berangsur-angsur kita mengikuti jalur perubahan yang lebih lengkap yang diletakkan oleh para pendidik, aktivis, dan ahli-ahli. Dan penting diingat bahwa Pendidikan Multikultural berkaitan dengan konsep yang relatif baru yang akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.*

Asas-Asas dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia

James A. Banks dikenal sebagai perintis Pendidikan Multikultural menekankan pentingnya mengajari mahasiswa “bagaimana cara mereka berpikir”, bukan sekedar “apa yang mereka pikirkan. Mahasiswa harus diajari untuk berpikir dalam memahami semua tipe pengetahuan. Menurut Banks, mahasiswa harus diinstruksikan agar mereka hidup dalam kemampuan untuk mencipta, memiliki kreasi melalui interpretasi tidak saja tentang sejarah masa lalu, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana sejarah itu terjadi. Setiap negara memiliki sejarah yang berbeda dalam “proses menjadi” sebuah bangsa. Begitu juga dengan Indonesia, ada beberapa asas yang menjadi ciri khas Pendidikan Multikultural Indonesia mengingat akan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang telah ditempa sejarah penjajahan yang panjang. Asas-asas itu antara lain :

- a. *Asas wawasan nasional/kebangsaan (persatuan dalam perbedaan).* Asas ini menekankan pada konsep kenasionalan/kebangsaan. Asas yang didasarkan kepemilikan bersama (sense of belonging) yang menjadi ciri budaya bangsa. Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa yang menjadi ciri unik Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Batik, wayang, musik keroncong, pencak silat, kesenian suku Asmat yang dikenal dan diterima di segenap wilayah negara ini sudah menjadi ikon

nasional dan ikon bangsa. Dengan menyebut satu budaya itu dunia mengetahui bahwa itu adalah ciri khas budaya bangsa Indonesia.

- b. *Asas Bhineka Tunggal Ika (perbedaan dalam persatuan)*. Konsep ini menekankan keragaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita. Keragaman dalam jenis tarian, pakaian, makanan, bentuk rumah dan sebagainya menjadikan Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya yang menjadi mosaik budaya.
- c. *Asas kesederajatan*. Indonesia yang menghormati asas ini. Semua budaya dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Tidak ada dominasi yang memaksakan ke kelompok kecil. Kalau kebetulan budaya Jawa lebih dikenal itu karena persoalan jumlah penduduk yang menduduki wilayah Jawa yang padat bukan dominasi budaya sebagaimana halnya orang barat menganggap warga kulit putih (*White*) yang lebih tinggi daripada kelompok kulit berwarna (*colour*).
- d. *Asas selaras, serasi dan seimbang*. Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi riil masing-masing dan seimbang di seluruh wilayah dan seluruh bangsa Indonesia.

Tiga Prinsip Penyusunan Program dalam Pendidikan Multikultural

Ada tiga prinsip yang digunakan dalam menyusun program Pendidikan Multikultural, yaitu :

1. Pendidikan Multikultural didasarkan kepada pedagogik baru yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Ada kesetaraan individu, antarindividu, antarbudaya, antarbangsa, antaragama. Pedagogik kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia (*dignity of human*).
2. Pendidikan Multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman yang dapat hidup bersama yang penuh toleransi yang bukan sekedar demokrasi prosedural tapi demokrasi substantif.
3. Prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer. Budaya handphone, internet dan e-commerce sudah menggejala secara global.

Latihan

Sampai di sini dulu pembahasan mengenai pengembangan Pendidikan Multikultural. Sebelum dilanjutkan pada Unit selanjutnya maka untuk lebih memantapkan pemahaman dan daya analisis Anda terhadap beberapa pengertian kebudayaan, terlebih dahulu silakan Anda mengerjakan beberapa latihan berikut ini.

1. Jelaskan hubungan antara makna Pendidikan Multikultural dengan pengembangan Pendidikan Multikultural ?
2. Jelaskan hubungan antara sejarah Pendidikan Multikultural dengan pengembangan Pendidikan Multikultural ?
3. Mampu menjelaskan tiga kelompok pemikiran yang biasa berkembang di Indonesia dalam menyikapi konflik yang sering muncul Indonesia.
4. Mampu menyebutkan tujuan Pendidikan Multikultural di Indonesia.

Petunjuk dan Rambu Jawaban Latihan

1. Pemaknaan Pendidikan Multikultural yang berbeda-beda berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural. Pendidikan Multikultural sebagai ide berimplikasi pada penambahan bahan ajar. Pendidikan Multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan berimplikasi pada perubahan semua komponen kegiatan pendidikan, yang mencakup: nilai-nilai yang mendasari, aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi dan pola kebijakan. Pendidikan Multikultural sebagai proses berimplikasi pada aksi yang terencana secara terus menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang.
2. Memahami sejarah singkat Pendidikan Multikultural secara global bermanfaat untuk pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan. Pendidikan Multikultural sebagai *konsep yang senantiasa berkembang dan beragam*. Pentinglah untuk meninjau kembali dasar-dasar historis yang dapat dijadikan sebagai akar darimana Pendidikan Multikultural itu berasal. Konsep pendidikan multikultural di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang menganut konsep demokratis karena sejak kelahiran dan sejarahnya memang bersorak multikultural, maka mereka berusaha melenyapkan diskriminasi rasial antara dominasi orang kulit putih dan kulit hitam yang terpinggirkan, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.
3. Ada tiga kelompok pemikiran yang biasa berkembang di Indonesia dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. *Pertama, pandangan primordialis*, yang menganggap ikatan primordial sebagai sumber utama benturan kepentingan. *Kedua, pandangan kaum instrumentalis*. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengejar tujuan yang lebih besar. *Ketiga, kaum konstruktivis*, yang beranggapan etnisitas merupakan sumber kekayaan untuk saling mengenal dan memperkaya budaya.
4. Pendidikan Multikultural. bertujuan adalah mengembangkan literasi etnis dan budaya, perkembangan pribadi, klarifikasi sikap dan nilai, kompetensi sosial multikultural, kemampuan ketrampilan dasar, persamaan dan keunggulan

pendidikan, dan memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, memiliki wawasan kebangsaan/kenegaraan yang kokoh,. memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia, dan hidup berdampingan secara damai.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural di beberapa negara, silakan Anda baca rangkuman sebagai berikut.

Rangkuman

1. Pemaknaan Pendidikan Multikultural yang berbeda-beda berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural. *Pendidikan Multikultural sebagai ide* berimplikasi pada penambahan bahan ajar. Ini merupakan langkah awal yang dapat diterapkan dalam pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Pendidikan Multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan* berimplikasi pada pengubahan semua komponen kegiatan pendidikan, yang mencakup: nilai-nilai yang mendasari, aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi dan pola kebijakan. *Pendidikan Multikultural sebagai proses* berimplikasi pada aksi yang terencana secara terus menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang.
2. ASCD Komisi Pendidikan Multikultural menegaskan bahwa Pendidikan Multikultural berhubungan : a. konsep humanistik yang didasarkan pada keragaman, hak asasi manusia, keadilan sosial dan gaya hidup, b. Pendidikan yang berkualitas, c. semua upaya memenuhi seluruh budaya siswa, d. memandang masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif, e. perbedaan adalah wahana memahami masyarakat global.
3. Grant menekankan bahwa Pendidikan Multikultural terkait dengan kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi
4. Nieto memandang Pendidikan Multikultural sebagai reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif, bukan sekedar penambahan materi dan pemahaman sudut pandang budaya lain. Pendidikan Multikultural terwujud dalam hubungan interpersonal yang menentang semua bentuk diskriminasi dan dalam bentuk menonjolkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ada suatu proses yang dijalani dalam hubungan interpersonal bukan sekedar segi kognitif semata.
5. Bennet menyatakan bahwa pendidikan multikultural didasarkan pada nilai dan keyakinan demokratis, dan upaya mengembangkan pluralisme budaya dalam masyarakat yang secara kultural berbeda. Menurut Bennet definisi Pendidikan Multikultural mencakup dimensi : gerakan persamaan, pendekatan multikultural,

proses menjadi multikultural, dan komitmen memerangi prasangka dan diskriminasi.

6. Pengembangan dari pendidikan multikultural pun berbeda mulai dari memberi informasi tentang berbagai kelompok di dalam buku teks, memerangi rasisme, hingga restrukturisasi kegiatan sekolah secara keseluruhan serta mereformasi masyarakat untuk membuat sekolah lebih adil, menerima dan seimbang secara kultural. Hal ini berarti perlu perubahan program, kebijakan dan praktek sekolah.
7. Pendidikan Multikultural sebagai *konsep senantiasa berkembang dan beragam*. Untuk pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia, kita perlu memahami sejarah singkat Pendidikan Multikultural secara global sebagai dasar pijak kita dalam menentukan arah pengembangan. Akar sejarah Pendidikan Multikultural terletak pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis tertindas. Hari libur dan hari khusus lainnya, perayaan etnis, dan pelajaran berfokus pada satu kelompok etnis merupakan karakteristik dominan dari reformasi selama tahun 1960-an dan awal 1970-an.
8. Faktor-faktor yang melatar belakangi semua pertikaian di tanah air itu disebabkan oleh kenyataan negara-bangsa (*nation-state*) yang terdiri dari masyarakat "multikultural".
9. Kebijakan yang "mementingkan kepentingan nasional" telah mengabaikan kemampuan masyarakat mengatasi masalah, sementara itu pemberian kewenangan yang terlalu besar pada daerah tanpa kesadaran kebangsaan dan kesadaran multikultural sering menimbulkan berbagai gejala di tanah air ini.
10. Ada tiga kelompok pemikiran di masyarakat dalam menyikapi konflik yang muncul. *Pertama, pandangan primordialis*, yang menganggap ikatan primordial sebagai sumber utama benturan kepentingan. *Kedua, pandangan kaum instrumentalis*. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain digunakan sebagai alat untuk mengejar tujuan yang lebih besar. *Ketiga, kaum konstruktivis*, yang menganggap etnis merupakan sumber kekayaan untuk saling mengenal dan memperkaya budaya
11. Sekolah dan lingkungan belajar harus memberi pengalaman belajar budaya masyarakat. Pendidikan Multikultural harus menjadi tujuan pengembangan warga negara dan warga masyarakat yang lebih demokratis lewat penyediaan pengetahuan yang lebih akurat, komprehensif dan lewat peningkatan prestasi akademis dan pemikiran kritis yang diterapkan pada masalah sosial.

Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia dapat berbentuk :

Penambahan materi multikultural pada semua bidang studi,

- berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri,

- berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan.
- Pada wilayah kerja sekolah, Pendidikan Multikultural mungkin berarti (1) *kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis*; (2) *suatu program yang mencakup pengalaman multikultural*, dan (3) *suatu total school reform*
- Gerakan persamaan.
- Proses yang panjang dan berkelanjutan.

Saat ini, ada banyak model dan kerangka kerja Pendidikan Multikultural. Ada variasi dalam pengembangan Pendidikan Multikultural, mulai dari penambahan sumber yang beragam dalam kurikulum hingga pada revisi kurikulum kecil hingga perubahan mendasar terhadap diri, sekolah, dan masyarakat.

12. Asas-asas Pendidikan Multikultural adalah asas persatuan dalam perbedaan (wawasan nasional/kebangsaan), perbedaan dalam persatuan (Bhineka Tunggal Ika) dan kesederajatan, dan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.
13. Ada tiga prinsip yang digunakan dalam menyusun program Pendidikan Multikultural, yaitu : pedagogik kesetaraan (*equity pedagogy*), manusia yang berbudaya, dan globalisasi budaya.

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari, silakan Anda kerjakan tes formatif berikut.

Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

1. Pendidikan Multikultural sebagai ide berimplikasi pada
 - a. penambahan bahan ajar
 - b. pengubahan semua komponen kegiatan pendidikan
 - c. program studi
 - d. aksi yang terencana secara terus menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang
2. Pendidikan Multikultural sebagai proses berimplikasi pada
 - a. penambahan bahan ajar
 - b. pengubahan semua komponen kegiatan pendidikan
 - c. program studi
 - d. aksi yang terencana secara terus menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang

3. ASCD Komisi Pendidikan Multikultural menegaskan bahwa Pendidikan Multikultural berhubungan dengan....
 - a. konsep humanistik, kualitas pendidikan, pemenuhan budaya siswa, masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif dan pemahaman masyarakat global
 - b. kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi
 - c. reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif
 - d. gerakan persamaan, pendekatan multikultural, proses menjadi multikultural, dan komitmen memerangi prasangka dan diskriminasi

4. Nieto berpandangan bahwa Pendidikan Multikultural berhubungan dengan....
 - a. konsep humanistik, kualitas pendidikan, pemenuhan budaya siswa, masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif dan pemahaman masyarakat global
 - b. kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi
 - c. reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif
 - d. gerakan persamaan, pendekatan multikultural, proses menjadi multikultural, dan komitmen memerangi prasangka dan diskriminasi.

5. Orang yang berpendapat bahwa Pendidikan Multikultural berkaitan dengan kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi adalah.....
 - a. Bennet
 - b. Komisi Pendidikan Multikultural ASCD
 - c. Nieto
 - d. Grant

6. Kelompok yang berpandangan positif yang menganggap etnis sebagai sumber kekayaan untuk saling mengenal dan memperkaya budaya adalah....
 - a. pandangan primordialis
 - b. pandangan kaum instrumentalis
 - c. kaum konstruktivis
 - d. pandangan kaum reformis

7. Pendidikan Multikultural sebagai ide, gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Tiga hal di atas tidak akan dapat dicapai bila hanya dicantumkan sebagai satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam satu bidang studi. Hal di atas adalah latar belakang pengembangan kurikulum sebagai....
 - a. reformasi total kurikulum
 - b. penambahan bahan ajar

- c. mata pelajaran khusus Pendidikan Multikultural
 - d. pembenahan struktur organisasi
8. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia adalah....
- a. total kurikulum
 - b. penambahan bahan ajar
 - c. mata pelajaran khusus Pendidikan Multikultural
 - d. pembenahan struktur organisasi
9. Yang *bukan* termasuk dalam asas-asas Pendidikan Multikultural adalah....
- a. asas persatuan dalam perbedaan (wawasan nasional/kebangsaan)
 - b. perbedaan dalam persatuan (Bhineka Tunggal Ika) dan
 - c. kesederajatan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan
 - d. keadilan sosial dan kemakmuran
10. Yang *tidak termasuk* prinsip yang digunakan dalam menyusun program Pendidikan Multikultural, adalah
- a. pedagogik kesetaraan (*equity pedagogy*)
 - b. manusia yang berbudaya
 - c. globalisasi budaya
 - d. global village

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

- 1)a. Penambahan bahan ajar.
- 2)d. Aksi yang terencana secara terus menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang.
- 3)a. Konsep humanistik, kualitas pendidikan, pemenuhan budaya siswa, masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif dan pemahaman masyarakat global.
- 4)c. Reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif.
- 5)d. Grant
- 6)c. Kaum konstruktivis,
- 7)c. Mata pelajaran khusus Pendidikan Multikultural
- 8)b. Penambahan bahan ajar
- 9)d. keadilan sosial dan kemakmuran.
- 10) d. global village

Daftar Pustaka

- Bennett, C. I. 1995. *Comprehensive multicultural education: Theory and practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nieto, S. 2000. *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Grant, C.A. dan Sleeter, C.E. 1977. *After the School Bell Rings*. Philadelphia: The Falmer Press.
- Swiniarski, L., Breitborde, M., & Murphy, J. 1999. *Educating the global village: Including the young child in the world*. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.